

**KAWIN LARI DALAM BUDAYA SIRI' PADA MASYARAKAT
SUKU BUGIS DI KECAMATAN NIPAH PANJANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROPINSI JAMBI**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**



**Oleh :
SEFRI NOVIARDI S.
NIM B4B 001 188**

**Pembimbing
Prof. I.G.N. Sugangga, S.H.**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

**KAWIN LARI DALAM BUDAYA SIRI' PADA MASYARAKAT
SUKU BUGIS DI KECAMATAN NIPAH PANJANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROPINSI JAMBI**

T E S I S

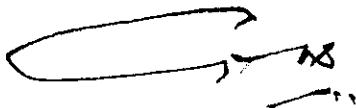
Oleh :

SEFRI NOVIARDI S.
NIM B4B 001 188

Telah Dipertahanan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 14 Oktober 2003
Dan Dinyataan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

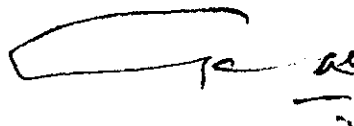
Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

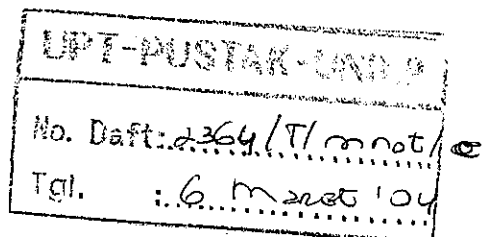


Prof. IGN. Sugangga, SH.
NIP. 130359 063

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. IGN. Sugangga, SH.
NIP. 130359 063



MOTTO

*hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti
usahlah kau tangisi hari kemarin
tidak ada yang jatuh dari langit dengan cuma-cuma
semua berkat usaha dan do'a*
(Dewa_19)



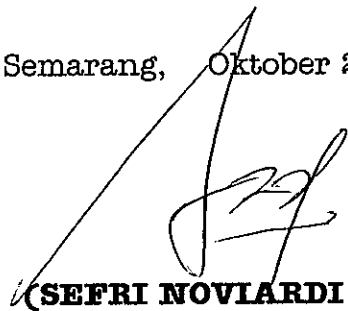
*bukan rahasia bila aku seorang pemimpi
dan aku bukanlah satu-satunya di dunia ini*
(John Lenon)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka.

Semarang, Oktober 2003



(SEFRI NOVLARDI S.)

ABSTRACT

Elopement in Sirri Culture in Bugis Tribe Society in Nipah Panjang District, East Tanjung Jabung Regency Jambi Province

By :

SEFRI NOVIARDI S.

B4B 001 188

Elopement in Bugis Tribe is one of the ways to escape from the requirements of a marriage. This research has the aims to find out the factors that cause elopement conducted by Bugis tribe, the result of elopement and how is the cultural solution for elopement applied to the elopement couple. The method of Approach used in this thesis is Empirical Jurisdiction, with research area in Jambi Province. Based on the Purposive Sampling, the research area is in Nipah Panjang District. The subject of this research is a couple who is involved in this elopement solution. The primary and secondary data are collected by a library research and field survey.

Based on the qualitative research, it is known that the main factors bring about the elopement by Bugis Tribe in Nipah Panjang District is; the bride's family usually do not agree with their daughter's choice or because she has been being matched before, the proposal price from bridegroom's family that is too expensive, and bride's family think that the man does not have good attitude. Meanwhile, the result of elopement is the humiliation for the bride's family if they should move from where they lived before, the relationship between parents and daughter will hate each other, and murder of both bride and bridegroom if they were both found. So the cultural solution for elopement is by sending a messenger from the bridegroom to bride's family to discuss the couple's relationship that has committed an elopement, giving some cultural replacement money for the ceremonial meal, and on one condition that the couple should be remarried.

ABSTRAKSI

Kawin Lari Dalam Budaya Sirri' Pada Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi

Oleh :

SEFRI NOVIARDI S.
B4B 001 188

Kawin lari oleh masyarakat Suku Bugis merupakan salah satu cara untuk melepaskan diri dari syarat-syarat terlaksananya perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat Suku Bugis, akibat dari perbuatan kawin lari, dan bagaimana penyelesaian adat terhadap kawin lari bagi pasangan kawin lari tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan wilayah penelitian di Propinsi Jambi. Berdasar purposive sampling daerah penelitian adalah Kecamatan Nipah Panjang. Subyek penelitian adalah mereka yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam penyelesaian kawin lari tersebut. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan survei lapangan.

Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa faktor-faktor penyebab kawin lari oleh masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang adalah keluarga pihak perempuan tidak menyetujui pilihan anaknya karena telah dijodohkan sebelumnya, terlalu tinggi uang lamaran dan pria tersebut tidak berkelakuan baik dipandang keluarga pihak perempuan. Sedangkan akibat dari kawin lari tersebut adalah karena malu pihak keluarga perempuan akan pindah dari tempat kediamannya, hubungan anak perempuan dengan orang tua dapat terputus, hubungan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan akan saling bermusuhan serta akan dilakukan pembunuhan terhadap salah satu pihak atau keduanya jika ditemukan. Adapun upaya penyelesaian secara adat terhadap kawin lari tersebut adalah dengan mendatangkan utusan pihak laki-laki ke tempat pihak perempuan untuk merundingkan hubungan dari pasangan yang melakukan kawin lari tersebut, memberikan uang pengganti adat untuk membiayai selamatan serta mensyaratkan kembali pada yang melakukan kawin lari tersebut untuk mengadakan pernikahan kembali.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul : “Kawin Lari Dalam Budaya Siri’ Pada Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi”.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapat bantuan, dorongan serta petunjuk dari Dosen Pembimbing, serta berbagai pihak lainnya yang juga memberikan bantuan yang sangat berharga. Maka pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dan sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan, petunjuk dan bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
2. Bapak R. Suharto, SH. M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Ibu Suharni, S.H. selaku Dosen Wali penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu memperlancar jalannya administrasi.
6. Bapak Drs. Djufri Ismail selaku Camat Nipah Panjang yang telah memberikan izin penelitian.
7. Bapak Drs. H.M. Said selaku Kepala Desa Teluk Kijing dan Bapak H.M. Daming selaku kepala desa Pemusiran yang telah memberikan data mengenai perkawinan adat suku Bugis.
8. Buat Papa (Alm), Mama, Daep, dan Rita serta Keluarga Besar Manin dan Keluarga Besar Anwar.

9. Teman-teman Angkatan 2000/2001 khususnya 2001 Kelas A, yang telah menemani penulis selama 2 tahun kuliah di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
10. Teman-teman Tegalsari : Evo, Akhyar, Norman, Da Dion, Kojim, Egy, Da Zay, Da Zam, Da Ali, Kak Is, Saipul, Anto, Yabes, Bang Adnan, Kak Tamsil, Mas Budy, Mas Slamet yang telah menemani penulis baik di kampus maupun dalam pergaulan sehari-hari (I Miss U All).
11. Teman-teman di Pleburan : Mbak Fa, Dian, Titin dan Rikawati (I Love U).
12. Teman-teman karang taruna RT. 01 Tegalsari : Nova, Aryo, Sado, Sohir, Tulus, Dodi dan lain-lain (Neng Die Bos).
13. Teman-teman Anggrek 8 : Bos Yana, Kadek, Komang, Wayan, Ari (Jangan Lupain Astro).
14. Teman-teman yang tidak disebutkan disini, bukan maksud untuk ngelupain.

Akhir kata, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih atas bantuan, bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah menyertai kehidupan kita semua. God Bless U. Amien.

Semarang, Oktober 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	4
1.5. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	6
2.1.1. Pengertian Perkawinan	6
2.1.2. Azas-azas Perkawinan	11
2.2. Hukum Perkawinan Adat Dalam Masyarakat	12
2.2.1. Sistem Perkawinan	12
2.2.2. Bentuk-Bentuk Perkawinan	13
2.2.3. Cara-cara Perkawinan	16
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Pendekatan	20
3.2. Spesifikasi Penelitian	21
3.3. Lokasi Penelitian	22
3.4. Teknik dan Teknik Sampel	22
3.5. Sumber Data	23
3.6. Teknik Pengumpulan Data	23
3.7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	24
3.8. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Suku Bugis Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur	27
4.1.1. Letak Geografis	27
4.1.2. Demografi Suku Bugis	29
4.1.3. Ekonomi dan Budaya	34
4.1.4. Sistem Kekerabatan Suku Bugis	36

4.2. Hukum Perkawinan Adat Suku Bugis	37
4.2.1 Pengertian Perkawinan	37
4.2.2 Bentuk Perkawinan Suku Bugis	39
4.2.3 Syarat-syarat Perkawinan Suku Bugis	44
4.2.4 Tata Cara Perkawinan Adat Suku Bugis	46
4.3. Implementasi Perkawinan Adat Melalui Kawin Lari Dalam Budaya Siri	57
4.3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari	57
4.3.2. Akibat Perbuatan Kawin Lari Dalam Konsep Siri' (Malu) Masyarakat Bugis	63
4.3.3. Cara Penyelesaian Adat	67

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran-Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peristiwa perkawinan merupakan kodrat bagi umat manusia. Untuk melangsungkan pernikahan tersebut di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari ketentuan agama, Undang-Undang yang berlaku maupun hukum adat masing-masing warga masyarakat.

Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan warga masyarakat Indonesia telah dominan dipengaruhi oleh hukum adat. Dikarenakan masyarakat Indonesia beraneka ragam suku dan bangsanya, sudah pasti beraneka ragam pula hukum adat yang hidup di tanah air Indonesia.

Meskipun warga masyarakat Indonesia telah banyak berpindah tempat dari tempat keturunannya semula ketempat lain yang tak sesuku dengannya tapi ada kalanya pegangan hukum adat daerah keturunannya masih kuat, sehingga tetap dipakainya di daerah lain tersebut dan berkemungkinan warga masyarakat di daerah lain tersebut terpengaruh dengan adat yang dibawanya. Namun demikian adapula mereka yang telah berpindah dari daerah keturunannya tidak lagi memakai hukum adatnya, tetapi mengikuti hukum adat di daerah yang didatanginya. Keadaan tersebut dialami pula oleh masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Meskipun demikian sebagian besar masyarakat suku Suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang tersebut masih memegang adat istiadat oleh masyarakat Bugis di Nipah Panjang masih menerapkannya di dalam hal upacara adat perkawinan. Pada dasarnya bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis sama halnya

dengan bentuk perkawinan yang dilakukan masyarakat Indonesia terutama yang menganut agama Islam, namun demikian dalam hal hukum adat masyarakat suku Bugis bentuk perkawinan yang dilakukan dapat pula dengan bentuk kawin lari.

Kawin lari ini pada masyarakat suku Bugis biasanya terjadi karena keluarga perempuan menolak pinangan pihak laki-laki. Tolakan pinangan ini bisa terjadi karena keluarga perempuan memandang calon pasangan anak perempuannya itu tidak sesuai untuk anaknya karena kemungkinan yang sangat banyak, antara lain :

- a. Laki-laki berasal dari keturunan lapisan masyarakat yang dianggap lebih rendah;
- b. Laki-laki itu dianggap kurang dalam kesopanan, adat istiadat atau yang lainnya;
- c. Anak perempuan sudah ripasitaro (dipertunangkan) dengan seorang jejak lain pilihan orang tuanya (kemungkinan kerabatnya sendiri).¹

Pada bentuk perkawinan berupa kawin lari ini, masyarakat suku Bugis mengenal istilah mallariang ialah membawa gadis lari dan silariang ialah laki-laki dan perempuan sepakat melarikan diri. Bentuk kawin lari tersebut menimbulkan peristiwa siri'. Semua anggota kerabat perempuan yang dibawa lari atau pergi bersama laki-laki akan menjadi to-masirik mereka berkewajiban untuk membunuh laki-laki yang melarikan anak perempuan mereka bila menemuinya, untuk menghindari peristiwa tersebut harus melalui proses yang disebut meddeceng artinya memperbaiki kembali.

¹. Anonim, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977, hal. 60.

Perbuatan kawin lari pada masyarakat suku Bugis apabila diacu segi keberlakuan hukum adat, sepintas terlihat dapat dibenarkan. Namun demikian apabila dilihat dari sebab-sebab terjadinya perkawinan dalam bentuk kawin lari, dapat dipandang tidak dibenarkan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meskipun demikian pada saat sekarang ini kejadian kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis masih tetap berlangsung, tidak terlepas pula bagi masyarakat suku Bugis yang berdomisili di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jamur Timur Propinsi Jambi.

Dengan tetap berlangsungnya pelaksanaan kawin tersebut dalam suatu penelitian dengan judul "KAWIN LARI DALAM BUDAYA SIRI' PADA MASYARAKAT SUKU BUGIS DI KECAMATAN NIPAH PANJANG KABUPATEN JABUNG TIMUR PROPINSI JAMBI".

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang ?
2. Apakah akibat kawin lari terhadap budaya siri' (malu) yang dipegang teguh masyarakat suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang ?
3. Bagaimana cara-cara penyelesaian adat yang ditempuh masyarakat suku Bugis terhadap akibat perbuatan kawin lari tersebut ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang.
2. Untuk mengetahui akibat kawin lari terhadap budaya siri' dalam pelaksanaannya pada masyarakat suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang.
3. Untuk mengetahui cara-cara penyelesaian adat yang ditempuh masyarakat suku Bugis terhadap akibat perbuatan kawin lari tersebut.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi :

1. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para pembaca mengenai kawin lari masyarakat suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi.
2. Dapat memberikan masukan bagi pengembangan hukum adat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Khususnya maupun di propinsi Jambi Umumnya mengenai adat Perkawinan suku Bugis.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan yang berisi uraian tentang : Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka yang berisi uraian tentang : Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Bentuk dan Sistem Perkawinan, serta Cara-cara Perkawinan.
- Bab III : Metodologi Penelitian yang menguraikan secara terperinci dan jelas tentang Metode Penelitian yang dilakukan meliputi : Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Sampel dan Teknik Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengumpulan Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.
- Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan Gambaran Umum Masyarakat suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang, faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang dan apa akibat yang ditimbulkan dari kawin lari tersebut serta bagaimana menyelesaikan adat yang ditempuh masyarakat suku Bugis terhadap akibat kawin lari tersebut.
- Bab V : Penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertakan pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 yang diatur dalam Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan “Ikatan lahir bathin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan bathin” saja, tetapi harus kedua-duanya.²

Bahwa ikatan lahir mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan bathin merupakan hal penting dalam perkawinan, ini menunjukkan bahwa menurut Undang-undang tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu.

Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan yang menentukan persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsungkan perkawinan itu disamping peraturan-peraturan tentang kelanjutan serta terputusnya suatu perkawinan.³

². K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 14.

³. Lili Rasjidi, *Op.Cit.*, hal. 8.

Sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974, terdapat banyak perbedaan tentang pengertian perkawinan antara golongan yang tunduk dengan KUHPerdata dengan golongan yang tunduk pada Hukum Islam.

Pasal 26 KUHPerdata, menyatakan bahwa perkawinan hanya dipandang dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja.

Senada dengan pasal 26 KUHPerdata adalah pasal 1 HOCI (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers), yang menetapkan bahwa tentang perkawinan Undang-Undang yang hanya memperhatikan perhubungan perdata saja.⁴

Sedangkan para penganut dan golongan yang tunduk pada Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu perbuatan keagamaan.

Akan tetapi setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974, maka terdapat persamaan tentang pengertian perkawinan.

Menurut Abdurrahman, pengertian perkawinan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tidak hanya suatu perbuatan hukum tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan.⁵

Disamping uraian tentang perkawinan yang telah penulis kemukakan di atas, maka akan dikemukakan pengertian perkawinan menurut para sarjana, yaitu :

1. Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.⁶

⁴. Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal. 7.

⁵. Abdurrahman, Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 9.

⁶. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 7.

2. Menurut **R. Soetojo Prawirohamidjojo** dan **Asis Safioedin** perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui negara.⁷
3. Menurut **Subekti**, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁸

Dengan melihat beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan para sarjana, maka jelaslah kiranya, bahwa para sarjana memandang perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Hukum Adat adalah :
“Urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan”.¹⁰

Adapun tujuan perkawinan pada hukum adat menurut H. Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut :

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis keapakkan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.¹¹

⁷. R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Asis Saefioedin, Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 13.

⁸. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984, hal. 13.

⁹. Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 8.

¹⁰. Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, CV. Megah Jaya Abadi. Mandar Maju, 1990, hal. 90.

¹¹. *Ibid*, hal. 23.

Dikarenakan sebagian besar suku-suku bangsa Indonesia termasuk masyarakat suku Bugis adalah beragama Islam, maka hukum adat mereka dilandasi dengan hukum Islam. Dengan dilandasi hukum Islam, maka tujuan perkawinannya secara tidak langsung sesuai dengan tujuan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, yaitu :

1. Menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah.
2. Mencegah maksiat, terjadinya perzinahan dan atau pelacuran.¹²

Pada umumnya bentuk perkawinan yang diadakan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan peminangan, namun demikian ada juga beberapa suku yang membenarkan perkawinan dalam bentuk kawin lari seperti diantaranya masyarakat suku Bugis adalah seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan dari kampung halaman mereka (mallari) dan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sama-sama bersepakat melarikan diri dari kampung halamannya (silariang).

Sahnya perkawinan yang diadakan diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan sahnya perkawinan menurut hukum adat menurut H. Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut :

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada yang

^{12.} Ibid, hal. 24.

dianut masyarakat yang bersangkutan. Maksudnya jika sudah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali mereka yang menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang belum menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti "sepelebegu" (pemuja roh) di kalangan orang Batak atau agama **Kaharingan** di kalangan orang-orang Dayak Kalimantan Tengah dan lainnya, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.¹³

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebelum para pihak melangsungkan perwinan terlebih dahulu harus diberitahukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian perkawinan itu dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah itu dengan didampingi oleh seorang wali nikah dan dua orang saksi. Setelah dilangsungkan perkawinan, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang merupakan alat bukti kawin yang sah, akta perkawinan tersebut ditanda tangani pula oleh wali nikah, dua orang saksi dan pegawai pencatat nikah. Begitu pula halnya dengan tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Indonesia terutama yang beragama Islam. Tetapi sebelum masyarakat adat Indonesia mendasari ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan, untuk acara sebelum perkawinan berlangsung dilakukan menurut hukum adat yang biasanya dipimpin oleh kepala adat jadi wali menurut struktur masyarakat hukum adanya masing-masing.

¹³. Ibid, hal. 27.

2.1.2. Azas-azas Perkawinan

Menurut Hilman Hadikusuma¹⁴ adapun azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai dibawah ini :

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
6. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga.

¹⁴. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal. 71.

2.2. HUKUM PERKAWINAN ADAT DALAM MASYARAKAT

2.2.1. Sistem Perkawinan

Sistem perkawinan dilihat dari keharusan dan larangan. Mencari calon isteri bagi setiap pria menurut soerojo Wignjodipuro¹⁵ ada 3 sistem yaitu :

1. Sistem Endogami
2. Sistem Exogami
3. Sistem Eleutherogami

Ad. 1. Sistem Endogami

Sistem endogami adalah sistem perkawinan yang dianut dimana seorang pria harus mencari calon isteri diluar marga (klen patrilineal) dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga.

Ad. 2. Sistem Exogami

Sistem exogami adalah dimana seorang pria diharuskan mencari calon isteri dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri dan dilarang mencari keluar dari lingkungan kerabat.

Ad. 3. Sistem Eleutherogami

Sistem eleutherogami adalah dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon isteri diluar atau didalam lingkungan kerabat/suku melainkan dalam batas-batas keturunan dekat (nasab) atau periparan (musyaharah) sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam atau Perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵. Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, 1971, Bandung, hal. 167.

Dimasa sekarang nampak kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan exogami dan endogami, walaupun disana sini masih nampak adanya keinginan golongan tua untuk tidak menghilangkan sama sekali sistem demikian, walaupun tidak secara sempurna. Oleh karena hanya diperlakukan untuk kepentingan kekerabatan dan harta warisan.

2.2.2. Bentuk-Bentuk Perkawinan

Bentuk-bentuk perkawinan dalam masyarakat ada di Indonesia menurut Hilman Hadikusuma¹⁶ ada tiga macam, yaitu :

1. Perkawinan Jujur
2. Perkawinan Semanda
3. Perkawinan Mentas

Ad. 1. Perkawinan Jujur

Bentuk perkawinan jujur adalah adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dan pihak pria kepada pihak wanita. Bentuk perkawinan ini terdapat pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal.

Dalam kerangka bentuk perkawinan jujur terdapat beberapa variasi bentuk perkawinan, seperti :

1. Perkawinan ganti suami adalah dikarenakan suami wafat maka isteri harus kawin dengan saudara pria dari suami yang telah wafat.

¹⁶. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 72.

2. Perkawinan ganti isteri adalah disebabkan isteri meninggal maka suami kawin lagi dengan kakak atau adik wanita dan isteri yang telah wafat itu (silih tikar).
3. Perkawinan mengabdikan adalah dikarenakan karena ketika diadakan pembicaraan lamaran, ternyata pihak pria tidak memenuhi syarat-syarat permintaan dari pihak wanita, sedangkan pihak bujang tidak menghendaki perkawinan semanda lepas, sehingga setelah perkawinan maka suami akan terus menerus bertempat kediaman di pihak kerabat isteri.
4. Perkawinan ambil beri adalah perkawinan yang terjadi diantara kerabat yang sifatnya symetris, dimana pada suatu masa kerabat A mengambil isteri dari kerabat B, maka pada yang lain kerabat B mengambil isteri dari kerabat A.
5. Perkawinan ambil abak adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mengambil anak wanita (tunggal), maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat isteri untuk selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan pihak isteri.

Ad. 2. Perkawinan Semanda

Bentuk perkawinan semanda adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Perkawinan semanda terdapat pada masyarakat adat yang patrilineal alternerend (kebapakan beralih-alih dan matrilineal).

Bentuk perkawinan semanda ini terdapat bermacam-macam yaitu :

1. Semanda raja-raja yaitu perkawinan dimana suami dan isteri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tepat kedudukan rumah tangga mereka sendiri.
2. Semanda lepas adalah perkawinan dimana suami melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya dan masuk kepada kerabat isteri.
3. Semanda runggu adalah perkawinan yang sifatnya sementara dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan dipihak kerabat isteri dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggungan jawabnya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya.
4. Semanda anak dagang adalah bentuk perkawinan yang tidak kuat ikatannya, oleh karena kedatangan suami dipihak isteri tidak bersyarat apa-apa, ia cukup datang dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu-waktu dapat pergi tana membawa apa-apa.
5. Semanda ngangkit adalah perkawinan dimana seorang tidak punya anak wanita dan hanya mempunyai anak pria maka untuk meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaannya ia harus mencari wanita untuk dikawinkan dengan anak prianya, sehingga kedua suami isteri itu nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya itu.

Ad. 3. Perkawinan Mentas

Perkawinan mentas adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami isteri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua/keluarga kedua pihak, untuk dapat berdiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Dalam pelaksanaan perkawinan mentas yang penting adalah persetujuan antara pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan itu. Bentuk perkawinan semarda ini terdapat pada masyarakat adat parental.

2.2.3. Cara-Cara Perkawinan

Di Indonesia ada berbagai macam cara-cara perkawinan. Antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda caranya demikian juga istilah yang digunakan berbeda juga.

Cara-cara perkawinan dapat dilaksanakan dengan melalui :

1. Perkawinan Pinang (Jawa-Nglamar)

Kebiasaan yang terjadi disini yaitu setelah laki-laki dan perempuannya itu setuju, orang tua dari si laki-laki datang kepada orang tua si perempuan untuk meminang anak gadisnya. Jika diterima oleh orang tua dari pihak perempuan tidak langsung dilanjutkan dengan perkawinan tetapi diadakan pertunangan terlebih dahulu.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab I pasal 1 butir a yang dimaksud peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Dalam peminangan ini dapat langsung dilakukan orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Sedang peminangan itu sendiri dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.

Pertunangan yang telah dilakukan baru mengikat apabila hadiah pertunangan telah diserahkan. Di Jawa alat pengikat ini disebut "paningset" dan di Sunda disebut Panyancang. Menurut kebiasaan masyarakat alat pengikat itu menjadi milik dari famili pihak perempuan. Alat pengikat ini dipakai juga sebagai tanda larangan apabila ada laki-laki lain yang hendak mengawininya. Dalam artian jangan sampai terjadi ada seorang perempuan dipinang oleh dua laki-laki sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Pertunangan ini dimaksudkan juga agar mendapatkan suatu kepastian bahwa perkawinan itu benar-benar akan terjadi.

Dari pihak laki-laki dapat memutuskan hubungan pertunangan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya pernyataan mengenai putusnya hubungan pertunangan itu atau secara diam-diam di laki-laki yang telah meminang itu menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinangnya.

Karena pertunangan ini belum menimbulkan akibat hukum maka pihak bebas untuk memutuskan pertunangan. Menurut adat Jawa apabila yang memutuskan pertunangan itu pihak perempuan maka

keluarganya harus mengembalikan “paningset” dua kali lipat harga semula kepada pihak laki-laki. Sedang apabila yang memutuskan itu pihak laki-laki maka “paningset” yang telah diberikan pada perempuan yang dipinangnya itu hilang dan tidak ada kewajiban dari perempuan untuk mengembalikan “paningset” itu.

Yang menjadi dasar alasan diadakannya pertunangan ini adalah tidak sama di beberapa daerah. Lazimnya adalah :

- Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
- Khususnya di daerah-daerah yang ada pergaulan sangat bebas antara muda-mudi, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh pertunangan itu.
- Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal, sehingga mereka kelak sebagai suami isteri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.¹⁷

2. Perkawinan lari bersama

Bisa dikatakan juga sebagai perkawinan yang tanpa dilakukan oleh lamaran dan pertunangan. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan orang tua tidak setuju. Kedua calon suami isteri yang telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan lari ke salah seorang kerabat atau familinya atau dapat juga ke rumah penghulu. Setelah itu baru baru diadakan pembicaraan tentang adat yang berlaku.

¹⁷ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Gunung Agung, 1983, hal. 125.

Cara perkawinan semacam ini banyak terjadi pada masyarakat yang menganut garis kekeluargaan patrilineal yaitu menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak.

Pada umumnya yang menjadikan alasan dilakukannya cara perkawinan seperti ini adalah untuk membebaskan diri dari bermacam-macam kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan yang dilakukan dengan lamaran dan pertunangan. Misalnya, memberi peningset pada pihak calon isteri.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dikaitkan dengan masalah kawin lari.

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena dengan menggunakan metode ini diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik obyek yang akan diteliti. Makna-makna yang akan diungkapkan dalam penelitian ini ialah bagaimana sesungguhnya penyebab kawin lari dalam budaya siri pada masyarakat suku Bugis tersebut.

Sebagaimana ciri penelitian kualitatif, maka penelitian ini berlangsung dengan latar yang wajar/alamiah. Dengan latar yang bersifat alamiah penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan tingkah laku masyarakat suku Bugis yang

melakukan kawin lari tersebut, penelitian ini tidak hanya menekan hal-hal yang nampak secara eksplisit saja melainkan harus melihat secara keseluruhan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.

Sanafich Faisal¹⁸ menyatakan banyak hal-hal yang dapat diangkat dari berbagai dimensi dalam penelitian kualitatif, setelah satu diantaranya auntut mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai gejala, kenyataan tingkah laku sosial dan budaya.

Selain hal-hal tersebut diatas penelitian kualitatif mempunyai beberapa kelebihan yaitu :

1. Mudah dalam penyesuaiannya jika berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Menyajikan secara langsung hakekat hubungan peneliti dengan responden.
3. Lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁹

3.2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis sebab menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa kawin lari pada masyarakat suku Bugis, untuk kemudian dianalisa untuk mendapatkan faktor penyebab kawin lari. Sehingga didapatkan cara-cara penyelesaian terhadap kawin lari pada masyarakat suku Bugis tersebut.

¹⁸. Sanafich Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang, Yayasan Asih Asih Asuh, hal. 8.

¹⁹. Lexy J. Maleong, 1995, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Posdekarya, hal. 5.

3.3. LOKASI PENELITIAN

Untuk efektifitas dan efisiensi waktu dan dana dalam penelitian maka dirasakan perlu untuk menetapkan lokasi, yaitu di desa Teluk Kijing dan desa Pemusiran yang berada di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanggung Jabung Timur propinsi Jambi. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan daerah tersebut sejak dahulu dihuni oleh masyarakat suku Bugis sampai sekarang.

3.4. TEKNIK DAN TEKNIK SAMPEL

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini meliputi masyarakat suku Bugis yang melakukan kawin lari dalam budaya siri tersebut.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Masyarakat adat suku Bugis.
- b. Ketua lembaga adat Kecamatan Nipah Panjang
- c. Kepala desa Teluk Kijing
- d. Kepala desa Pemusiran
- e. Camat Nipah Panjang

Metode penentuan sampel dalam penentuan sampel ini adalah teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Aturan pemilihan teknik ini adalah keterbatasan waktunya, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

3.5. SUMBER DATA

Data yang dikumpulkan dalam penulisan tesis ini meliputi data sekunder dan data primer, yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode pengumpulan data meliputi :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung ditempat yang meliputi perilaku, sikap dan persepsi masyarakat suku Bugis yang terkait dengan kawin lari maupun yang tidak.
2. Data sekunder yaitu berupa perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, literatur-literatur, dan sumber-sumber pustaka lainnya.

3.6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari teknik pengumpulan data utama dan teknik pengumpulan data penunjang. Teknik pengumpulan data utama adalah peneliti sendiri sedangkan teknik pengumpulan data penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.²⁰

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara :

1. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak struktur, wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung.

²⁰. S. Nasution, *Metode Penelitian naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992. hal. 9.

2. Observasi (pengamatan) intensif, yaitu pengamatan yang dilakukan terhadap masyarakat suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi tersebut.

3.7. TEKNIK PENGECEKAN KEABSAHAN DATA

Dalam penulisan ini, cara-cara yang dipakai untuk mengumpulkan data dari hasil wawancara pada orang-orang yang masuk ke dalam sampling dan untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh tersebut, maka menggunakan “Teknik Triangulasi Data”, yaitu suatu teknik dimana untuk memeriksa keabsahan suatu data memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan yang dipakai sebagai pembanding dari data yang diperoleh.

Menurut Lexy J. Moleong, mengatakan :

“Bahwa teknik Triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya, Denzin (1978) membedakan Empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang dimanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.²¹

Dalam penulisan ini menerapkan sistem pemeriksaan keabsahan data melalui sumber, yaitu dengan jalan membandingkan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Disini yang dibandingkan adalah :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

²¹. Lexy J. Moleong, *op.cit*, hal. 178.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan persepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, disini perbandingan dilakukan atas wawancara oleh penulis kepada pihak-pihak yang menjadikan sampling dengan data-data dari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Tetapi dalam hal ini menurut Lexy J. Meleong, mengemukakan bahwa :

“Dalam hal ini jangan sampai banyak mengharapkan bahwa hasil perbandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat atau pemikiran, yang penting disini ialah bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut (Patton 1987 : 331)”²²

Selain melalui sumber pengecekan keabsahan data dapat dilakukan dengan teknik triangulasi dengan teori, dimana didasarkan pada suatu anggapan bahwa suatu fakta tentu tidak dapat diperiksa keabsahan datanya dengan membandingkan dari satu atau lebih suatu teori.

Hal ini dijelaskan oleh Lexy Moleong, yang mengatakan bahwa :

“Jika penelitian membandingkan hipotesis pembanding dengan penjelasan pembanding, bukan berarti ia menguji atau meniadakan alternatif penjelasan itu. Jika penulis gagal menemukan “bukti” yang cukup kuat terhadap penjelasan alternatif dan justru membantu peneliti dalam menjelaskan derajat kepercayaan atau hipotesis asli. Melaporkan hasil penelitian disertai penjelasan sebagaimana yang dikemukakan tadi jelas akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh”²³

22. Ibid.

23. Ibid.

3.8. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁴

Pengertian di analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis dengan pendekatan sosiologis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dengan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²⁵ Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

²⁴. Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal. 12

²⁵. HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press Surakarta, 1998. hal. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM SUKU BUGIS DIKECAMATAN NIPAH PANJANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

4.1.1. Letak Geografis

Kecamatan Nipah Panjang merupakan bagian wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kecamatan Nipah Panjang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1974 tentang Pengesahan Pemekaran Kecamatan Muara Sabak menjadi Kecamatan Muara Sabak dan Kecamatan Nipah Panjang. Adapun letak Kecamatan Nipah Panjang tersebut terdapat ditepi pantai timur Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Timur.

Luas wilayah Kecamatan Nipah Panjang lebih kurang 26.547 Km², yang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Berhala;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sadu;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rantau Rasau;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak.

Jarak pusat pemerintahan wilayah Kecamatan dengan desa yang terjauh adalah 10 Km dengan jarak tempuh 1 jam dengan pembantu Bupati adalah 129 Km dengan jarak tempuh 4 jam, begitu pula jaraknya dengan ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian jarak kecamatan ini dengan pusat kedudukan kota Administratif, pusat kedudukan wilayah Pembantu Gubernur dan Ibu Kota Propinsi Jambi adalah 139 Km dengan jarak tempuh 4 jam.

Sedangkan bentuk wilayah Kecamatan Nipah Panjang ini datar sampai berombak 40%, berombak sampai berbukit 28% dan berbukit sampai bergunung 32%.

Kecamatan Nipah Panjang ini terdiri dari lima desa dan dua kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Nipah Panjang I;
2. Kelurahan Nipah Panjang II;
3. Desa Teluk Kijing;
4. Desa Pemusiran;
5. Desa Sungai Raya;
6. Desa Simpang Datuk;
7. Desa Simpang Jelita.

Adapun sebagai lokasi penelitian penulis adalah desa Teluk Kijing dan desa Pemusiran. Desa Teluk Kijing mempunyai luas wilayah sebesar 2.837 Km, dengan batasan wilayahnya adalah sebelah utara berbatasan dengan desa Pemusiran, Sebelah Barat berbatasan dengan desa Simbur Naik dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Nipah Panjang I.

Sedangkan desa Pemusiran mempunyai luas wilayah sebesar 1.945 Km, dengan batasan wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa Teluk Kijing, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Berhala, sebelah barat berbatasan dengan desa Sungai Raya dan sebelah timur berbatasan dengan Ibukota Kecamatan Nipah Panjang.

4.1.2. Demografi Suku Bugis

Penduduk Kecamatan Nipah Panjang adalah sejumlah 31.193 jiwa, dengan perincian yaitu jumlah pendudukan laki-laki sebanyak 16.275 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 14.918 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, jumlah kepala keluarga sebanyak 7.342 kepala keluarga.

Penduduk Kecamatan Nipah Panjang ini sifatnya heterogen, yaitu terdiri dari berbagai suku sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Suku-suku di Kecamatan Nipah Panjang
Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2003

No.	Suku	Jumlah Penduduk	%
1.	Bugis	18.716	60
2.	Jawa	9.258	30
3.	Melayu	1.827	6
4.	Lain-lain	1.247	4
Jumlah		31.193	100

Sumber Data : Kantor Kecamatan Nipah Panjang.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa meskipun pada Kecamatan Nipah Panjang terdapat berbagai suku, tetapi jumlah penduduk suku Bugis yang paling banyak yaitu sebesar 60% dari keseluruhan penduduk yang mendiami Kecamatan Nipah Panjang.

Pada desa Teluk Kijing Kecamatan Nipah Panjang jumlah penduduknya adalah sebesar 3.322 jiwa, dengan suku-suku yang ada di desa Teluk Kijing tersebut sebagaimana tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Suku-suku di Desa Teluk Kijing
Kecamatan Nipah Panjang Tahun 2003

No.	Suku	Jumlah Penduduk	%
1.	Bugis	2.159	65
2.	Jawa	166	5
3.	Melayu	631	25
4.	Lain-lain	166	5
Jumlah		3.322	100

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Teluk Kijing Kecamatan Nipah Panjang.

Berdasarkan gambaran tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di desa Teluk Kijing, maka jumlah penduduk Bugis yang paling besar yaitu 60% dari keseluruhan jumlah penduduk suku-suku lainnya.

Kemudian pada desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang jumlah penduduknya adalah sebesar 2.998 jiwa, dengan jumlah masing-masing penduduk per sukunya dapatlah terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Suku-suku di Desa Pemusiran
Kecamatan Nipah Panjang Tahun 2003

No.	Suku	Jumlah Penduduk	%
1.	Bugis	2.009	67
2.	Jawa	389	13
3.	Melayu	540	18
4.	Lain-lain	60	2
Jumlah		2.998	100

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang.

Memperhatikan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa jumlah suku yang terbanyak di desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang adalah penduduk suku Bugis yaitu sebesar 67% dari keseluruhan jumlah penduduknya.

Ditinjau dari segi usia, jumlah penduduk suku Bugis Kecamatan Nipah Panjang adalah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 4.
Jumlah Penduduk Suku Bugis Menurut Usia
Di Kecamatan Nipah Panjang Tahun 2003

No.	Usia	Jumlah Penduduk
1.	0 – 6 Tahun	989 orang
2.	7 – 12 Tahun	1.424 orang
3.	13 – 18 Tahun	4.921 orang
4.	19 – 24 Tahun	4.308 orang
5.	25 – 55 Tahun	3.619 orang
6.	56 – 79 Tahun	2.779 orang
7.	80 ke atas	676 orang
Jumlah		18.716 orang

Sumber Data : Kantor Kecamatan Nipah Panjang

Berdasarkan tabel empat tersebut di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk Suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang paling besar adalah yang berusia mudah dan produktif.

Pada desa Teluk Kijing, jumlah penduduk Suku Bugis ditinjau dari segi usia adalah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 5.
Jumlah Penduduk Suku Bugis Menurut Usia
Di Desa Teluk Kijing Tahun 2003

No.	Usia	Jumlah Penduduk
1.	0 – 3 Tahun	168 orang
2.	4 – 12 Tahun	221 orang
3.	7 – 14 Tahun	267 orang
4.	13 – 24 Tahun	241 orang
5.	16 – 55 Tahun	70 orang
6.	19 ke atas	72 orang
7.	10 – 14 Tahun	179 orang
8.	15 – 19 Tahun	176 orang
9.	20 – 26 Tahun	220 orang
10.	27 – 40 Tahun	247 orang
11.	41 – 56 Tahun	231 orang
12.	57 ke atas	67 orang
Jumlah		2.159 orang

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Teluk Kijing Kecamatan Nipah Panjang

Dari tabel lima tersebut, tergambar bahwa penduduk suku Bugis yang mendiami desa Teluk Kijing sebahagian besar adalah berusia sangat muda dan berusia produktif.

Kemudian pada desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang jumlah penduduk suku Bugis ditinjau dari segi usia adalah sebagaimana tertuang di tabel berikut ini :

Tabel 6.
Jumlah Penduduk Suku Bugis Menurut Usia
Di Desa Pemusiran Tahun 2003

No.	Usia	Jumlah Penduduk
1.	0 – 3 Tahun	97 orang
2.	4 – 12 Tahun	103 orang
3.	7 – 18 Tahun	152 orang
4.	13 – 24 Tahun	146 orang
5.	16 – 55 Tahun	161 orang
6.	19 ke atas	217 orang
7.	10 – 14 Tahun	210 orang
8.	15 – 19 Tahun	199 orang
9.	20 – 26 Tahun	178 orang
10.	27 – 40 Tahun	223 orang
11.	41 – 56 Tahun	174 orang
12.	57 ke atas	149 orang
Jumlah		2.009 orang

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang

Dari tabel enam tersebut di atas, sama halnya dengan penduduk suku Bugis yang mendiami desa Teluk Kijing, yaitu usia penduduknya mayoritas masih muda dan produktif.

Ditinjau dari segi agama, maka jumlah penduduk kecamatan Nipah Panjang terlihat pada tabel berikut ini :

Dari tabel delapan tersebut di atas, tergambar bahwa dari seluruh penduduk Kecamatan Nipah Panjang, maka penduduk suku Bugislah yang paling banyak yang belum bersekolah maupun yang masih buta huruf, meskipun dalam pendidikan yang terlaksana sebahagian besar juga dirasakan oleh penduduk suku Bugis.

4.1.3. Ekonomi dan Budaya

1. Ekonomi

Masyarakat Kecamatan Nipah Panjang terutama masyarakat suku Bugis sebahagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Disamping itu ada juga yang bermata pencaharian lain sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 9.
Mata Pencaharian Penduduk
Kecamatan Nipah Panjang Tahun 2003

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	%
1.	Petani	15.475 orang	78,52
2.	Nelayan	537 orang	2,72
3.	Pengusaha	32 orang	0,16
4.	Pengrajin	15 orang	0,08
5.	Buruh Industri	182 orang	0,92
6.	Buruh Bangunan	135 orang	0,69
7.	Pedagang	402 orang	0,04
8.	Pengangkutan	52 orang	0,26
9.	PNS	412 orang	0,09
10.	ABRI	18 orang	0,09
11.	Pensiun PNS/ABRI	17 orang	0,09
12.	Peternak	2.432 orang	12,33
Jumlah		19.709 orang	100

Sumber Data : Kantor Kecamatan Nipah Panjang

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Nipah Panjang sebahagian besar adalah bermata pencaharian sebagai petani, disusul sebagai peternak, nelayan dan lain sebagainya.

2. Budaya

a. Pendidikan

Untuk meningkatkan kecerdasan warga masyarakatnya, maka di Kecamatan Nipah Panjang menyediakan fasilitas pendidikannya sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 10.
Jumlah Fasilitas Pendidikan Penduduk
Kecamatan Nipah Panjang 2003

No.	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1.	TK	23 unit
2.	SD Negeri	34 unit
3.	SD Impres	34 unit
4.	SMTP Negeri	2 unit
5.	Madrasah/Sanawiyah Negeri	1 unit
6.	SMTP Swasta Umum	2 unit
7.	SMTP Swasta Islam	1 unit
8.	SMTA Swasta Umum	1 unit
9.	SMTA Swasta Islam	1 unit
Jumlah		99 unit

Sumber data : Kantor Kecamatan Nipah Panjang

Dilihat pada tabel tersebut di atas, diketahui bahwa fasilitas pendidikan yang disediakan di Kecamatan Nipah Panjang hanya sampai tingkat SMTA, sehingga apabila penduduk ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi mereka keluar dari kecamatan tersebut.

b. Agama

Penduduk Kecamatan Nipah Panjang sebahagian besar adalah beragama Islam terutama sekali penduduk suku Bugis yang keseluruhannya beragama Islam. Sesuai dengan keadaan bahwa mayoritas penduduk beragama Islam, maka jumlah fasilitas peribadatan agama lain di Kecamatan Nipah Panjang belum ada.

Jumlah fasilitas peribadatan agama Islam di Kecamatan Nipah Panjang adalah Masjid sebanyak 31 buah dan surau atau Musholla sebanyak 160 buah.

Di setiap desa dan kelurahan di Kecamatan Nipah Panjang mempunyai masjid dan surau atau musholla masing-masing yang dipergunakan penduduk untuk tempat beribadah, tempat mengaji dan tempat untuk memperingati hari-hari besar Islam. Sedangkan penganut agama lain yang hendak beribadah harus pergi ketempat lain.

4.1.4. Sistem Kekerabatan Suku Bugis

Dalam hubungan kekerabatan dikenal adanya tiga sistem kekerabatan yaitu patrilineal, matrilineal dan bilateral.

Sistem kekerabatan patrilineal adalah memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, yang mengakibatkan setiap laki-laki dalam kerabat ayah masuk di dalam hubungan kekerabatan, sedangkan semua kaum kerabat ibu jatuh di luar kekerabatan.

Sistem kekerabatan matrilineal adalah memperhitungkan kekerabatan melalui ibu dan mengakibatkan bahwa setiap perempuan dalam kerabat ibu masuk dalam hubungan di luar kerabat.

Sistem kekerabatan bilateral adalah memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui laki-laki maupun perempuan. Sistem kekerabatan bilateral ini tidak mempunyai suatu akibat yang selektif, karena bagi tiap laki-laki maupun perempuan dalam kerabat ayah maupun ibu masuk dalam batas hubungan kekerabatan, sehingga tidak ada batas sama sekali.

Dari ketiga sistem kekerabatan tersebut di atas jika disesuaikan atau dibandingkan dengan sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang menganut sistem kekerabatan bilateral, karena setiap masyarakat suku Bugis dalam menarik garis keturunannya dari atas selalu menghubungkan dirinya kepada pihak ayah maupun pihak ibunya. Dengan kata lain hubungan kekerabatan antara seorang anak terhadap kaum kerabat dari pihak ayah tetap sederajat dengan hubungan kekerabatan terhadap kaum kerabat ibunya.

4.2. HUKUM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS

4.2.1. Pengertian Perkawinan

Pasal I Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Indonesia buku tentang Hukum Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon qholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sedangkan menurut Ny. Soemiyati, pengertian perkawinan adalah sebagai berikut :

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut dengan “Nikah” ialah : melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentrangan dengan cara-cara yang diridhoi Allah.²⁶

Selain itu menurut Sution Usman Adji, perkawinan itu adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri”.²⁷

Selanjutnya menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan merupakan “unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat”.²⁸ Kemudian ditambahkannya sebagai berikut :

Perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Disamping itu ada kalanya perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan yang telah menjauh atau retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat dan begitu pula perkawinan itu bersangkut paut dengan warisan dan harta kekayaan.²⁹

Kemudian dilain pihak, menurut agama pada dasarnya, perkawinan itu adalah sebagai berikut :

Perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samaskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.³⁰

²⁶. Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*” Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 8.

²⁷. Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal. 21.

²⁸. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adar*, Bandung Alumni, 1983, hal. 22.

²⁹. *Ibid*, hal. 23.

³⁰. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 10.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas, dapatlah dikemukakan bahwa perkawinan itu adalah akad yang sangat kuat atau ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk mentaati perintah Tuhan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial serta memperbaiki hubungan kekerabatan sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

4.2.2. Bentuk Perkawinan Suku Bugis

Bentuk perkawinan di Indonesia sesuai dengan bentuk kekerabatannya terdiri dari tiga macam yaitu perkawinan jujur, semenda dan bebas. Dalam hal ini Hilman Hadikusuma menyatakan :

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem "Perkawinan Jujur" dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami (Batak, Lampung, Bali); "Perkawinan Semenda" dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman isteri (Minangkabau, Semendo Sumatera Barat); "Perkawinan Bebas" (Jawa : mencar, mentas) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami isteri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka menurut kehendak mereka. Yang terakhir ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang telah maju (modern).³¹

Adapun tiga bentuk perkawinan di atas bertitik tolak pada adanya proses peminangan, artinya sebelum dilangsungkan perkawinan salah satu pihak baik pihak laki-laki maupun pihak wanita melakukan peminangan

³¹. *Ibid*, hal. 9.

pada pasangannya. Hal ini benarkan baik menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia. Selain itu bentuk perkawinan peminangan tersebut diatas terdapat pula dalam praktek di masyarakat bentuk kawin lari, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuman sebagai berikut :

Tetapi tidak selamanya rasan sanak itu dapat diterima dan disetujui orang tua salah pihak. Oleh karenanya di lingkungan masyarakat adat walaupun perbuatan berlarian untuk kawinitu tidak dibenarkan, namun sering terjadi perbuatan bujang gadis berlarian untuk melakukan perkawinan ("vluch huwelijk, wegloop-huwelijk", Belanda; "Mangalua", Batak; "Selarian", Bengkulu; "Sebambangan, Metudau", Lampung; "Nyolong", Banyuwangi; "Ngerorod, Merrangkat", Bali; "Silariang", Bugis; "Lari-bini", Ambon). Hal itu sering terjadi, walaupun sebenarnya perbuatan itu melanggar hukum adat yang akibatnya akan dikenakan hukuman (denda) dikarenakan terpaksa untuk menghindari persyaratan adat.³²

Meskipun bentuk kawin lari tidak dibenarkan terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi hal tersebut tetap saja berlangsung. Pada masyarakat suku Bugis, perkawinan yang diadakan berdasarkan hukum adanya terdiri atas dua bentuk yaitu :

1. Bentuk Perkawinan dengan Peminangan

Dalam bentuk peminangan ini perkawinan yang diadakan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan didahului dengan adanya peminangan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan pinangan laki-laki tersebut diterima oleh pihak perempuan. Bentuk perkawinan ini selain disahkan oleh hukum adat masyarakat suku Bugis dan dibenarkan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³². Hilman Hadikusuma, *Perkawinan Adat*, Op. Cit., hal. 33.

2. Bentuk Perkawinan dengan Beralarian atau Kawin Lari

Meskipun dalam bentuk perkawinan berlarian atau kawin lari ini ada kalanya didahului dengan peminangan, tetapi peminangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki tidak diterima oleh pihak perempuan.

Latar belakang terjadinya kawin lari ini menurut Hilman Hadikusuma adalah dikarenakan :

1. Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan dan upacara perkawinan yang diminta pihak gadis tidak dapat dipenuhi pihak bujang;
2. Gadis belum diizinkan oleh orang tuanya untuk bersuami tetapi dikarenakan keadaan gadis bertindak sendiri;
3. Orang tua akan keluarga gadis menolak lamaran pihak bujang, lalu gadis bertindak sendiri;
4. Gadis yang telah bertunangan dengan seorang pemuda yang tidak disukai oleh si gadis;
5. Gadis dan bujang telah berbuat yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama (Gadis sudah hamil, dan lain-lain).³³

Begitu pula halnya dengan terjadinya kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis, yang disebabkan :

- a. Laki-laki yang menginginkan anak gadis dari pihak perempuan berasal dari keturunan lapisan masyarakat yang dianggap lebih rendah.
- b. Laki-laki tersebut dianggap kurang dalam kesopanan, adat istiadat maupun lain sebagainya.
- c. Anak perempuan sudah dipertunangkan dengan seorang jejaka yang merupakan pilihan orang tuanya.

³³. *Ibid*, hal. 34.

Hal tersebut di atas pada dasarnya merupakan alasan-alasan untuk menolak pinangan pihak laki-laki yang melamar anak gadisnya, meskipun demikian antara laki-laki yang melamar dengan anak gadis yang dilamar telah ada hubungan dan telah suka sama suka untuk melangsungkan perkawinan.

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa kawin lari yang terjadi dalam masyarakat suku Bugis terdiri dari dua jenis, yaitu “seorang laki-laki membawa lari seorang gadis yang dikenal dengan istilah **Mallariang** dan kedua belah pihak yakni laki-laki dengan gadis sama-sama sepakat untuk melarikan diri yang dikenal dengan istilah **Silariang**.

Menurut pandangan Islam, perbuatan kawin lari tersebut bertentangan dengan agama karena selain penyebabnya berupa adanya status sosial, penindasan hak asasi manusia dan pemaksaan kehendak tanpa adanya musyawarah antara para pihak, serta akibat yang ditimbulkan akan dapat menimbulkan dosa seperti terbukanya aib keluarga maupun perbuatan-perbuatan maksiat lainnya.

Apabila kawin lari ini meskipun tidak sesuai dengan tata cara perkawinan masyarakat suku Bugis tetapi hal tersebut dibenarkan, karena hal itu tertuang dalam hukum adat Bugis dengan penggunaan istilah **mallariang** dan **silariang**.

Menurut pandang Islam, perbuatan kawin lari tersebut, bertentangan dengan agama karena selain penyebabnya berupa adanya status sosial, penindasan hak asasi manusia dan pemaksaan kehendak

tanpa adanya musyawarah antara para pihak, serta akibat yang ditimbulkan akan dapat menimbulkan dosa seperti terbukanya aib keluarga maupun perbuatan-perbuatan maksiat lainnya.

Apabila kawin lari ini diacu dengan ketentuan Pasal 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menegaskan :

- (1). Karena melarikan wanita dipidana
Ke – 1 : Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang siapa melarikan wanita di bawah umur dengan tidak izin orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan si wanita itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan maupun tiada dengan perkawinan.
Ke – 2 : Dengan pidana penjara selama-selamanya sembilan tahun, barang siapa melarikan wanita dengan akal tipu, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan maupun tiada dengan perkawinan.
- (2). Penuntutan harus dilakukan atas pengaduan.
- (3). Pengaduan itu dilakukan :
- (4). Bilamana yang memberi izin telah kawin dengan wanita yang dibawa lari itu, serta bagi perkawinan itu berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pemidanaan tak dapat dilakukan sebelum perkawinan itu dinyatakan sah.

Dari ketentuan Pasal 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas, dapatlah diuraikan bahwa setiap kawin lari yang secara tidak langsung membawa lari anak gadis orang lain dikenakan ancaman hukuman pidana penjara yaitu tujuh tahun apabila perbuatan berlarian itu disetujui oleh perempuan yang dibawa lari, tetapi apabila berlarian itu perempuannya tidak setuju untuk melarikan diri tetapi akibat tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan maka terhadap laki-laki yang membawanya lari dikenakan ancaman hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Untuk dapat melakukan penuntutan terhadap laki-laki yang membawa lari anak gadis tersebut adalah apabila ada pengaduan, yang mana pengaduan dapat dilakukan oleh wanita itu sendiri atau walinya apabila pada waktu dibawa lari telah dewasa, maka pengaduan dapat dilakukan oleh wanita itu ataupun suaminya, kalau sudah kawin. Apabila dalam berlarian itu mereka telah kawin, maka laki-laki yang membawa lari tidak dapat dikenakan pidana sebelum perkawinan dibatalkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bentuk kawin lari ini tidak sesuai dengan norma dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun demikian hingga saat sekarang ini masih saja terjadi, yang diantaranya dilakukan oleh sebagian masyarakat suku Bugis yang berdomisili di wilayah Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi.

4.2.3. Syarat-syarat Perkawinan Suku Bugis

Sebagaimana telah diketahui bahwa sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Begitu pula dalam hukum adat bahwa sahnya suatu perkawinan yang diadakan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut H. Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut :

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.³⁴

³⁴. H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Op. Cit., hal. 2.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dengan ketentuan dari hukum adat yang berlaku di tanah air Indonesia ini syarat sahnya suatu perkawinan yang diadakan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah apabila perkawinan itu sesuai dengan ketentuan agama ataupun kepercayaannya dan tidak berketentangan dengan ketentuan agama atau kepercayaannya tersebut.

Sebagaimana warga masyarakat Indonesia lainnya, maka pada masyarakat suku Bugis dalam melangsungkan atau melaksanakan suatu perkawinan juga mempunyai beberapa syarat perkawinan. Adapun syarat-syaratnya adalah :

1. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama yang dianut yaitu agama Islam, yang mana laki-laki maupun perempuan yang melangsungkan perkawinan merupakan satu agama dan tata cara perkawinannya berdasarkan ketentuan agama Islam
2. Adanya persetujuan kedua belah pihak, baik antara laki-laki dengan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan maupun para keluarga pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.
3. Pihak yang melakukan perkawinan telah akil baliq atau sudah dewasa, dalam hal ini tidak ada pembatasan dari usia perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Seorang laki-laki harus siap materi.
5. Seorang laki-laki harus mempunyai pengetahuan lengkap tentang hubungan kerumah tangga.

6. Seorang perempuan harus mempunyai pengetahuan keterampilan dalam rumah tangga maupun seluk beluk yang berhubungan dengan urusan rumah tangga.

Berdasarkan syarat-syarat perkawinan masyarakat suku Bugis tersebut, maka persyaratan bagi seorang yang akan kawin lebih banyak dikenakan pada pihak laki-laki. Bagi seorang laki-laki yang akan kawin diperlukan persiapan berupa materi untuk pelaksanaan perkawinan dan harus pula melengkapi dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan tentang hubungan kerumah tangganya, sebab kekurangan-kekurangan yang akan terjadi dalam rumah tangganya kesalahan kebanyakan ditimpakan pada laki-laki, misalnya isteri sakit-sakitan atau masalah lain lainnya. Seorang suami diharuskan mengetahui bagaimana membina rumah tangga terutama sekali menjaga keselamatan keluarganya. Oleh sebab itu laki-laki yang kawin sebaiknya berguru pada orang-orang yang keadaan rumah tangganya bahagia dan sejahtera. Sedangkan seorang perempuan, untuk menghadapi masa perkawinannya cukup hanya dibekali dengan pengetahuan ketrampilan dalam rumah tangga dan seluk beluk serta hal-hal yang berhubungan dengan kerumah tangga.

4.2.4. Tata Cara Perkawinan Adat Suku Bugis

Mengenai tata cara perkawinan masyarakat Indonesia terutama yang menganut agama Islam didasarkan atas ketentuan Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. Kemudian tata cara perkawinan yang dilakukan haruslah sesuai dengan ketentuan agamanya atau kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya perkawinan yang diadakan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang mewakili pihak laki-laki dan pihak perempuan (Pasal 10).

Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan sebelumnya. Setelah ditanda tangani oleh kedua mempelai, selanjutnya akta perkawinan tersebut ditanda tangani oleh kedua orang saksi atau wali nikah dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri perkawinan tersebut. Dengan telah adanya penandatanganan akta perkawinan tersebut oleh pihak-pihak yang terkait dalam kelangsungan perkawinan itu seperti kedua mempelai, kedua orang saksi perkawinan, maupun pegawai perkawinan, maka perkawinan telah dicatat secara resmi (Pasal 11).

Tata cara atau upacara perkawinan adat suku Bugis merupakan peristiwa penting. Baik bagi laki-laki dan perempuan yang akan melangsung perkawinan, para keluarga, kerabat masyarakat. Dengan demikian tata cara perkawinan diselenggarakan secara khusus dan meriah.

Mengingat pentingnya peristiwa perkawinan sebagai bagian dari proses dalam perkawinan, maka tata cara perkawinan itu dibedakan dalam tiga tahap, yaitu tahap peminangan, tahap pelaksanaan perkawinan dan tahap setelah perkawinan, yang secara rinci seperti terlihat sebagai berikut :

1. Tahap Peminangan

Pada masyarakat Bugis dalam pemilihan jodoh lebih diutamakan dalam lingkungan kerabat, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Akan tetapi apabila tidak terdapat pasangan yang lebih cocok, maka dipilihlah dari lingkungan luar yang bukan kerabat bahkan ke luar daerahnya.

Pertimbangan yang penting harus diperhatikan dalam pemilihan pasangan bahkan merupakan prinsip, dalam hal ini orang Bugis dikenal dengan istilah **sekapuk** (sepadan) dan wajar dalam hukum perkawinan, sedangkan hubungan yang dianggap tak wajar disebut dengan istilah **tessikapuk**. Hubungan perkawinan yang sekapuk tersebut dapat dilihat dari segi hubungan darah dan hubungan struktur sosial.

Apabila calon telah disepakati, selanjutnya dilakukan **mapessek-pesek** adalah suatu acara untuk mengetahui apakah si gadis yang telah dipilih itu belum ada yang mengikatnya dan apabila kemungkinan untuk diterima dalam pinangan itu. Penyelidikan berlangsung secara rahasia oleh seorang kepercayaan untuk mendekati keluarga anak gadis yang dianggap cukup mempunyai pengetahuan tentang gadis itu dan orang tuanya. Apabila menurut hasil penyelidikan belum ada yang mengikatnya maka selanjutnya pihak keluarga laki-laki mengutus beberapa orang terpandang, baik dari kalangan keluarga maupun dari kalangan luar lingkungan keluarga untuk datang menyampaikan lamaran, disebut dengan istilah **madduta** atau **massura**.

Madduta artinya mengirim utusan untuk mengajukan lamaran dari seorang laki-laki untuk seorang perempuan. Utusan ini mempunyai peranan yang penting. Dalam melakukan lamaran orang harus hati-hati dan bijaksana, harus pandai membawakan diri agar orang tua anak gadis tidak merasa tersinggung. Kedatangan to madduta ini ke rumah orang tua gadis setelah terlebih dahulu memberi kabar supaya orang tua gadis bersedia menerimanya.

Utusan pihak laki-laki tersebut dengan duta **mallio** atau utusan resmi, karena mereka ini langsung berhadapan dengan orang tua atau wali dari anak gadis yang akan dilamar. Pertemuan tersebut didahului dengan pembicaraan-pembicaraan tentang kehidupan sehari-hari dan sebagainya akan tetapi pembicaraan-pembicaraan yang bersangkutan paut dengan kedatangannya. Sebagai pembuka maksud kunjungan itu maka keluar pantun-pantun sebagai berikut :

- | | | |
|--------------|---|--|
| To-madduta | : | Duami kuala sampo
Unganna pana sae
Beol-belona rositta |
| To-madduta | : | Laro bunga rositta
Tepu tabakka roni
Engkana go sappona |
| To-riaddutai | : | Dekga pasak diliputta
Belanca rekampotta
Mulinco mabela |
| To-madduta | : | Engkana pasak riliputta
Balanca rikampotta
Naekiya nyawami kusappa |
| To-riaddutai | : | I ganaro elo ribungata
Bunga tammadaunge
Bunga tammatakkewe |
| To-madduta | : | Taroni tammaddaung
Belo-belona temmalatek |

Secara bebas terjemahannya adalah

- To-madduta : Dengan hati yang jujur
Suci, murni kami datang
Membawa berita bahagia
- To-madduta : Kembang ros itu cukup mekarlah
Sudah, apakah belum ada yang
menyimpannya ?
- To-riaddutai : Apakah tak ada gadis di negeri tuan,
sehingga jauh tuan mencari kami
- To-madduta : Ada juga gadis cantik di negeri kami,
tetapi bukan kecantikan yang kami cari,
melainkan budi pekerti yang baik.
- To-riaddutai : Siapakah yang ingin memetik anak kami,
anak yang belum tahu apa-apa
- To-madduta : Biarlah tak tahu apa-apa, karena perhiasan
yang tak kunjung layu, akan kujadikan
pelita hidup.³⁵

Setelah mendengar niat suci pihak laki-laki tersebut maka pihak keluarga perempuan akan menyatakan bila demikian tekad tuan, pelajarilah saya dan saya mempelajari tuan.

Dalam hal kunjungan tersebut pihak laki-laki mengantar sirih pinang yang terdiri dari :

- a. 7 ikat daun sirih (setiap ikat terdiri dari 7 lembar).
- b. 7 biji pinang merah.
- c. 7 biji gambir.
- d. 7 bungkus kapur.
- e. 7 bungkus tembakau.

Selain itu disertakan pula dengan :

- a. Cincin permata
- b. 1 atau 2 lembar buatan baju dan sarung.

³⁵. Anonim, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta, 1977), hal. 63.

Pada masa kunjungan tersebut diadakan acara **mappettu** atau memutus kata, hal ini sangatlah penting karena waktu itulah digunakan untuk merundingkan dan memutuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan, yang antara lain :

- a. Penentuan waktu (Tanra Ezzo).
- b. Uang belanja (Belanca)
- c. Mas kawin (Sompa) dan lain-lain.

Rombongan pemutus kata (**pappetu** ada) ini terdiri dari laki-laki dan perempuan yang masing-masing berpakaian adat yang dipimpin oleh orang yang dianggap tua yang memakai baju hitam, mereka disambut dengan sebaik-baiknya oleh pihak keluarga perempuan. Setelah acara **peneguhan pappetu** ada selesai selanjutnya para hadirin disugahi hidangan berupa kue-kue adat Bugis yang pada umumnya manis-manis dengan maksud agar hidup calon pengantin selalu manis atau senang dikemudian hari. Sambil minum-minum pihak laki-laki meminta agar penentuan waktu dapat dibicarakan atau disepakati pula yang disebut dengan **mattanra** (tanda hari). Apabila telah kata sepakat, maka waktu itu dibicarakan pula masalah uang belanja (belanca) yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk digunakan dalam pesta perkawinan yang akan dilangsungkan. Besar kecilnya uang belanja ini tergantung dari kesepakatan bersama. Pihak perempuan uang ada kalanya tidak menentukan jumlah yang diminta, tetapi tidak jarang

pula pihak perempuan meminta uang belanja yang sangat besar hingga jutaan rupiah. Dewasa ini uang belanja menjadi masalah dan merupakan salah satu indikator terjadinya perbuatan kawin lari.

Kemudian dibicarakan pula mengenai **sompa ujung**, hal ini dengan maksud untuk meringankan segala sesuatu dalam penyelenggaraan perkawinan dengan menyerahkan sejumlah uang yang telah menjadi keputusan kedua belah pihak. Selanjutnya membicarakan mengenai mahar (**sompa**) yang merupakan pemberian berupa uang ataupun berupa harta dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan untuk sahnya pernikahan yang secara resmi diucapkan pada waktu akad nikah akan berlangsung. Mengenai mahar atau sompa ini bagi masyarakat Suku Bugis dapat terdiri dari :

- a. Sompa Bocco E diberikan kepada raja-raja perempuan (Bone, Wajo, Soppeng) yang memegang kekuasaan sejumlah 14 kati doi lama. Nilai 1 kati sama dengan 88 rella + 8 doi diserahkan bersama seorang ata dan seekor kerbau.
- b. Sompa Anak Bocco E diberikan kepada putra-putri darah penuh dari ketiga raja Tellum Pocco E atau bangsawan tinggi lainnya sejumlah 7 kati doi lama.
- c. Sompa Kati diberikan kepada putra-putri anak meattola, jumlah satu kati doi lama atau 88 real + 8 orang + 8 doi. Bersama ini seorang ata kecuali Wajo ata ditiadakan.
- d. Sompa Anak Rajeng, untuk anak-anak rajeng hanya berlaku di Wajo jumlah maharnya 2 kati doi lama.
- e. Soma Cerak Sawi, untuk putra-putri anak cerak sawi kira-kira sama dengan putra-putri aanarung Sipue (Bone) jumlah maharnya 1 doi lama.
- f. Soma Tau Deceng, untuk putra-putri tau maradeka, golongan tau deceng jumlah maharnya $\frac{1}{2}$ doi lama.
- g. Sompa Tau Samak, untuk putra-putri tau maradeka, golongan tau samak jumlah maharnya 1.4 kati doi lama.³⁶

³⁶. *Ibid*, hal. 65.

Dengan telah adanya kesepakatan dalam pembicaraan-pembicaraan penting tentang masalah yang diputus tersebut di atas, maka upacara peminangan dianggap selesai dan masing-masing pihak bersiap-siap menghadapi upacara perkawinan.

Sebelum upacara perkawinan, diadakan pengantaran pengikat (pessiok) yang pada masa lampu biasanya berupa :

- a. Beberapa bentuk cincin, seperti :
 - 1). Cincin Siwu-siwu
 - 2). Cincin Lola-lola
 - 3). Cincin Pitu-pitu
- b. Alat berhias, seperti :
 - 1). Sisir emas 1
 - 2). Pisau-pisau emas 1
 - 3). Kalakatti emas (alat pengupas pinang)
 - 4). Caparu-caparu emas untuk tempat :
 - a). Bedak
 - b). Dupa
 - c). Pabbalo (gincu)
 - d). Minyak Patti (minyak rambut)
- c. Kain-kain masing-masing terdiri dari 2 pis :
 - 1). Untuk membuat kelambu.
 - 2). Kaci
 - 3). Tirai dinding

Selain itu dibawa kue-kue khas masyarakat Bugis dan buah-buahan.

Sementara dalam kesibukan menghadapi pesta, calon pengantin tidak kurang mendapat perhatian dan perawatan. Biasanya tiga malam berturut-turut sebelum hari pernikahan calon pengantin melakukan mandi uap (mappasau).

2. Tahap Pelaksanaan Perkawinan

Dalam hal ini terdiri atas empat tahap sebagai mana terurai sebagai berikut :

a. Mapaci atau wenni Mapaci (Malam berinai)

Merupakan malam terakhir dari kehidupan gadis bujang yang menuju kepada hidup berumah tangga. Upacara ini dilaksanakan di rumah masing-masing. Masing-masing dihiasi lengkap seperti pengantin dikipasi dan disaksikan oleh seluruh kerabatnya masing-masing dan para tamu. Semua yang hadir laki-laki maupun perempuan mengambil daun-daun yang telah diramu yang dikenal dengan sitlah **Pocci** (inai) lalu diletakkan pada telapak tangan calon pengantin sambil membacakan do'a selamat kepadanya.

b. Kawing atau Mannika (kawin atau menikah)

Pada waktunya, di rumah pengantin perempuan diadakan pesta besar untuk menerima pengantin laki-laki beserta rombongan dan para undangan. Rombongan yang mengantar pengantin laki-laki terdiri dari rombongan perempuan dan rombongan kaum laki-

laki yang disebut dengan **Pampawana**. Setelah diterima kedua pengantin itu dinikahkan oleh seorang imam yang disaksikan oleh saksi yang disebut dengan **Ambe Botting** dan **Indo Botting**, yaitu orang tua yang khusus menghias pengantin. Disamping itu ada juga **Pengapi**. Pengapi ini merupakan pengawal yang ikut juga bersanding disisi kedua mempelai, merekapun ikut juga dirias seperti pengantin. Pengapi ini terdiri dari anak perempuan dan anak laki-laki yang kira-kira berumur 10 tahun. Pengapi (anak laki-laki) duduk disamping pengantin laki-laki dan pengapi perempuan duduk disamping pengantin perempuan.

c. Marola atau Ripaccula

Terdiri dari **Marola Wakkacciceng** dan **Marola Wekka Dua**. Marola Wakkacciceng ialah pengantin laki-laki bermalam di rumah pengantin perempuan dan besoknya kedua mempelai bermalam di rumah orang tua pengantin laki-laki.

Maroa Wekka Dua yaitu setelah kedua mempelai bermalam di rumah orang tua laki-laki, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua mempelai perempuan untuk bermalam dan besoknya bermalam lagi di rumah pihak pengantin laki-laki.

Setelah upacara ini, mereka kembali lagi ke rumah orang tua pengantin perempuan dan pada malam harinya pengantin laki-laki disuruh mengejar pengantin perempuan atau isterinya dengan tujuan agar keduanya **Sewa Ada** atau kenal baik. Keduanya **Dipaccule** dengan maksud menghilangkan rasa malu-malu.

d. Mamatoa

Yiatu pada waktu pengantin perempuan pergi marola di rumah orang tua pengantin laki-laki, maka Indo Botting pengantin perempuan menyerahkan beberapa buah sarung kepada orang tua pengantin laki-laki dan orang tua laki-laki yang diberi sarung itu biasanya tidak mau mengambilnya, tetapi malahan meletakkan uang di atas sarung itu untuk hadiah kepada pengantin perempuan, atau sarung tadi diambilnya tetapi digantinya dengan uang yang dinilainya jauh melebihi harga sarung tersebut. **Mammatoa** atau pemberian ballasan dari pihak orang tua kepada pengantin perempuan itu diperlihatkan kepada seluruh pihak keluarga pengantin laki-laki yang hadir.

3. Tahap Sesudah Perkawinan

Setelah tahap pelaksanaan perkawinan selesai, masih ada kebiasaan yang dilaksanakan yang terdiri dari dua tahap yaitu :

a. Majjenne-jenne

Adalah upacara mandi-mandi, dilaksanakan kira-kira 5 hari setelah pesta perkawinan. Kedua suami istri beserta famili dan kenalan-kenalan pergi mandi-mandi ke tempat pemandian. Bila diantara anggota rombongan ada yang enggan atau tidak mau mandi, biasanya akan diintip oleh teman-temannya dan akan disembur dengan air atau langsung ditarik masuk ke dalam air sehingag pakaiannya akan basah kuyup. Tujuan dari Majjenne-jenne ini ialah untuk menggembirakan kedua suami istri yang baru kawin.

b. Menziarahi Kubur

Setelah 3 atau 4 hari dari Majjenne-jenne kedua suami istri itu bersama-sama dengan beberapa orang famili pergi ke kuburan untuk menziarahi kuburan famili, kuburan orang-orang tua dengan maksud secara tidak langsung memberitahukan kepada arwah sanak keluarga atau arwah orang tua-tua suami istri itu telah selamat menempuh jenjang perkawinan.

4.3. IMPLEMENTASI PERKAWINAN ADAT MELALUI KAWIN LARI DALAM BUDAYA SIRI

4.3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa bentuk perkawinan yang dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang adalah bentuk perkawinan dengan peminangan yang dibenarkan oleh ketentuan agama, adat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bentuk perkawinan yang dengan berlarian yang bertentangan dengan ketiga ketentuan tersebut walaupun terdapat dalam ketentuan adat masyarakat suku Bugis. Bentuk kawin lari ini masih saja terjadi dalam masyarakat suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang, diantaranya di desa Pemusiran dan desa Teluk Kijing.

Adapun jumlah kasus kawin lari yang terajdi di desa Pemusiran dan Desa Teluk Kijing Kecamatan Niaph Panjang dalam lima tahun belakangan ini adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 11.
Jumlah Kasus Kawin Lari di Kecamatan Nipah Panjang
Tahun 1999 – 2003

No.	Nama Desa	Jumlah Kasus					Jumlah
		1999	2000	2001	2002	2003	
1.	Pemusiran	3	1	-	1	-	5
2.	Teluk Kijing	2	2	3	1	1	9
		5	3	3	2	1	14

Sumber data : Kantor Kepala Desa Pemusiran dan Teluk Kijing
Kecamatan Nipah Panjang.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus kawin lari yang terjadi di dua desa di Kecamatan Nipah Panjang yaitu Desa Pemusiran dan Teluk Kijing sebanyak 14 kasus, yaitu Deas Pemusiran sebanyak 5 kasus dan Desa Teluk Kijing 9 kasus. Perincian kasus-kasus kawin lari tersebut pertahunnya yaitu pada tahun 1999 kasus kawin lari di Desa Pemusiran terjadi 3 kasus dan di Desa Teluk Kijing terjadi 2 kasus. Pada tahun 2000 kasus kawin lari di desa Pemusiran terjadi 1 kasus dan desa Teluk Kijing terjadi 2 kasus. Pada tahun 2001 tidak ada kasus kawin lari di Desa Pemusiran, sedangkan di Desa Teluk Kijing terjadi 3 kasus. Pada tahun 2002 kasus kawin lari di Desa Pemusiran dan Desa Teluk Kijing masing-masing terjadi 1 kasus kawinl lari. Pada tahun 2003 di Desa Pemusiran tidak terjadi kawin lari, sementara di Desa Teluk Kijing terjadi 1 kasus.

Dengan demikian nyatalah bahwa kasus kawin lari oleh masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang tiap tahun selalu saja terjadi.

Sebagaimana diketahui bahwa kawin lari tersebut bukanlah kehendak hati nurani para pihak yang kawin dengan melarikan diri, karena kehendak mereka sebenarnya adalah dapat melangsungkan perkawinan tanpa adanya hambatan tanpa dan dibenarkan oleh ketentuan agama, adat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan adanya faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan perkawinan mereka, maka mereka nekad untuk melarikan diri.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari ini menurut H.M.

Baming selaku Kepala Desa Pemusiran adalah sebagai berikut :

Faktor-faktor penyebab kawin lari oleh masyarakat suku Bugis di desa ini adalah :

1. Keluarga pihak perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, karena mereka telah mempunyai jodoh tersendiri untuk anaknya tersebut.
2. Terlalu tingginya uang lamaran yang diminta oleh pihak perempuan.³⁷

Kemudian oleh H.M. Said selaku Kepala Desa Teluk Kijing juga diterangkan pula sebagai berikut :

Faktor-faktor penyebab kawin lari di desa kami ini adalah :

1. Terlalu tingginya uang lamaran yang diminta keluarga perempuan.
2. Perempuan tersebut telah dijodohkan pada waktu masih kecil oleh orang tuanya.
3. Pria tersebut tidak berkelakuan baik dipandang oleh keluarga pihak perempuan.³⁸

³⁷. H.M. Daming, *Wawancara*, Kantor Kepala Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang, Tanggal 29 Juli 2003.

³⁸. H.M. Said, *Wawancara*, Kantor Kepala Desa Teluk Kijing Kecamatan Nipah Panjang, Tanggal 30 Juli 2003.

Berdasarkan keterangan kepala-kepala desa tersebut di atas, diketahuilah bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari oleh masyarakat suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang adalah berupa :

1. Keluarga pihak perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, karena anaknya telah dijodohkan sebelumnya.

Keadaan ini sudah lumrah terjadi pada masyarakat suku Bugis, yang mana mereka selalu menjodoh-jodohkan anaknya dan jodoh yang ditentukan adalah orang-orang yang masih ada pertalian keluarga. Kawin lari akibat adanya perjodohan lain di Desa Pemusiran terjadi 2 kasus, sedangkan di desa Teluk Kijing terjadi 3 kasus.

2. Terlalu tingginya uang lamaran.

Pada masyarakat suku Bugis dalam pelaksanaan perkawinan, yang lebih ditonjolkan adalah besarnya uang lamaran yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Semakin besar uang lamaran akan semakin meningkat prestise pihak keluarga perempuan dimata orang lain dan menunjukkan bahwa keluarganya berada pada kelas sosial yang tinggi. Selain itu pihak laki-laki yang melamar anaknya juga termasuk orang yang berkelas sosial yang tinggi pula dan setidaknya menjamin kehidupan anaknya di kemudian hari. Hal ini bagi laki-laki yang mampu bukanlah menjadi masalah, tetapi bagi pihak laki-laki yang hendak kawin tidak mampu untuk membayar uang lamaran yang sangat tinggi tersebut, yang sekarang rata-rata lima juta rupiah ke atas, adalah merupakan suatu permasalahan. Dikarenakan keinginan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan tetapi tidak

mempunyai uang, maka ia nekad untuk berbuat apapun terutama melakukan kawin lari. Kawin lari akibat terlalu tingginya uang lamaran ini, di Desa Pemusiran dalam lima tahun belakangan ini terjadi 3 kasus, sementara di Desa Teluk Kijing terjadi 5 kasus.

3. Pria tersebut tidak berkelakuan baik dipandang keluarga pihak perempuan.

Hal ini sudah lumrah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik itu masyarakat Suku Bugis maupun masyarakat suku lainnya. Kehendak pihak keluarga perempuan dapat dibenarkan apabila laki-laki tersebut benar-benar tidak berkelakuan baik dalam kehidupannya, karena dengan menerima laki-laki yang diketahui tidak berkelakuan baik dalam kehidupan sehari-harinya dapat merusak nama baik keluarga pihak perempuan dan dapat pula tidak menjamin kebahagiaan hidup anak gadisnya di kemudian hari. Namun demikian bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan tidak dapat menerima penolakan lamaran tersebut sehingga untuk melangsungkan perkawinan yang mereka dambakan, mereka melakukan dengan perbuatan kawin lari. Kawin lari akibat penolakan lamaran karena laki-laki dianggap berkelakuan baik, dalam lima tahun terakhir ini di desa Teluk Kijing terjadi 1 kasus.

Jadi jelaslah bahwa kawin lari yang terjadi dalam masyarakat suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang pada dasarnya bukanlah tujuan dari pihak yang melangsungkan perkawinan, tetapi karena adanya faktor-faktor

yang dapat menghalangi pelaksanaan perkawinan mereka, maka satu-satunya jalan yang mereka anggap baik adalah melakukan kawin lari. Hal ini diperkuat dari keterangan sebagian responden masyarakat sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 12.
Tindakan yang Dilakukan Terhadap Faktor Penghalang Perkawinan Menurut Responden Masyarakat

No.	Tindakan	Jumlah	%
1.	Tidak jadi melaksanakan perkawinan.	1	5
2.	Melakukan kawin lari.	13	65
3.	Membunuh orang yang menghalangi.	2	10
4.	Menghamili anak gadisnya terlebih dahulu.	4	20
Jumlah		20	100

Sumber data : 10 responden suku Bugis di Desa Pemusiran dan 10 Responden suku Bugis di Desa Teluk Kijing, Kecamatan Nipah Panjang.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa apabila terdapat faktor yang menjadi penghalang pelaksanaan perkawinan di luar kehendak para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, maka tindakan yang ditempuh menurut 1 orang (5%) responden adalah tidak jadi melaksanakan perkawinan, menurut 13 orang (65%) responden adalah melakukan kawin lari dan 2 orang (10%) responden menyatakan membunuh orang yang menghalangi perkawinannya sedangkan 4 orang (20%) responden menyatakan menghamili anak gadis yang dilarang kawin dengannya terlebih dahulu. Dari keseluruhan pernyataan responden tersebut dalam pengambilan tindakan apabila terdapat faktor penghalang pelaksanaan perkawinan, yang paling banyak menyatakan tindakan yang diambil adalah melakukan kawin lari.

4.3.2. Akibat Perbuatan Kawin Lari Dalam Konsep Siri' (malu) Masyarakat Bugis

Seperti diketahui bahwa siri' (malu) itu adalah berkaitan dengan harkat dan martabat, maka sudah barang tentu kawin lari yang dilakukan akan berpengaruh besar terhadap siri' (malu) masyarakat suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang.

Kuatnya siri' (malu) ini dipegang oleh masyarakat suku Bugis terlihat jelas bila harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut dapat berbuat apa saja untuk membalas dendamnya atau memperbaiki nama besar keluarganya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Begitu pula halnya dengan kawin lari yang merupakan salah satu perbuatan pelanggaran siri' (malu), mereka yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut akan membalas secara keji.

Besarnya pengaruh siri' (malu) ini atas perbuatan kawin lari bagi masyarakat suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang dijelaskan oleh Djufri Ismail. Camat Kecamatan Nipah Panjang, sebagai berikut :

Kuatnya siri' (malu) dipegang oleh suku Bugis di Kecamatan ini, maka terhadap perbuatan kawin lari sebagai pelanggaran siri' (malu) pihak yang dirugikan atau yang terkena aib akan mengambil tindakan berupa :

1. Kemungkinan besar apabila bertemu pria yang membawa lari anak gadisnya tersebut akan dibunuh. Hal ini dalam lima tahun belakangan ini pernah terjadi 1 kali pada tahun 1992.
2. Apabila tidak bertemu dengan pria yang dicari tersebut kemungkinan keluarga wanita akan pindah dari desa tersebut.³⁹

³⁹. Djufri Ismail, *Wawancara*, Kantor Camat Kecamatan Nipah Panjang, Tanggal 26 Juli 2003.

Kemudian ditambahkan pula oleh H Pattarae selaku Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kecamatan Nipah Panjang, sebagai berikut :

Kawin lari ini berpengaruh sangat besar dengan siri' (malu) yang dianut masyarakat Bugis, maka apabila terjadi kawin lari :

1. Pihak keluarga wanita akan mencari si pria kemanapun dia pergi, kemudian kalau bertemu dapat dibunuh oleh mereka.
2. Pihak keluarga laki-laki akan terus berhati-hati terhadap serangan keluarga wanita.⁴⁰

Berdasarkan keterangan dua orang tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa perbuatan kawin lari mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap siri' (malu) yang dipegang teguh masyarakat suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang, sehingga apabila terjadi kawin bukan tidak mungkin pihak keluarga perempuan yang harkat dan martabatnya dilanggar dengan lari atau dilarikan anaknya tersebut akan membunuh laki-laki yang membawa anak gadisnya..

Apabila si laki-laki yang melarikan anak gadis tidak didapatkan, maka untuk menghilangkan rasa malu pihak keluarga perempuan akan pindah dari desa yang didiaminya, tetapi hal ini dalam lima tahun belakangan ini tidak pernah terjadi lagi dan walaupun mereka tidak menemukan laki-laki yang melarikan anak gadisnya tetap saja tinggal di desa lamanya.

Dengan terjadinya kawin lari tersebut bukan saja mengganggu harkat dan martabat keluarga pihak perempuan yang dibawa lari, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap harkat dan martabat keluarga pihak laki-

⁴⁰. H. Pattarae, *Wawancara*, Kantor Camat Kecamatan Nipah Panjang, Tanggal 26 Juli 2003.

laki, sehingga mereka dengan kejadian ini selain menanggung malu juga harus selalu berhati-hati terhadap kemungkinan serangan dari pihak keluarga perempuan.

Jadi jelaslah bahwa kawin lari berpengaruh sangat besar terhadap siri' yang dapat menimbulkan adanya suatu perbuatan pembunuhan. Kuatnya tindakan pembunuhan yang akan ditempuh dalam hal terjadinya kawin lari ini terlihat pada pernyataan responden masyarakat, seperti yang terlihat pada tabel 13 :

Tabel 13.
Tindakan yang Dilakukan Atas Terjadinya Kawin lari Menurut
Responden Masyarakat.

No.	Tindakan	Jumlah	%
1.	Biar saja	2	10
2.	Laki-laki harus dibunuh	12	60
3.	Keduanya harus dibunuh	6	30
Jumlah		30	100

Sumber data : 10 responden suku Bugis di Desa Pemusiran dan 10 Responden suku Bugis di Desa Teluk Kijing, Kecamatan Nipah Panjang.

Dari gambaran yang terlihat pada tabel 13, diketahui bahwa tindakan yang dapat dilakukan dengan terjadinya kawin lari menurut 2 orang (10%) responden adalah dengan membiarkan saja, sedangkan selebihnya 18 orang responden lebih condong menyatakan bahwa yang melakukan kawin lari untuk dilakukan pembunuhan, yaitu 12 orang (60%) responden menyatakan yang dibunuh adalah laki-laki yang membawa lari anak gadis dan 6 orang (30%) responden menyatakan bahwa kedua pihak yang melakukan kawin lari harus dibunuh.

Selain itu perbuatan kawin lari dalam hubungannya dengan siri' (malu) yang dianut oleh suku Bugis terlihat dengan akibat yang mungkin timbul dengan kawin lari tersebut. Dalam hal ini Djufri Ismail, Camat Nipah Panjang menerangkan sebagai berikut :

Untuk tetap terjaganya siri' (malu) atas terjadinya kawin lari, maka akibat yang timbul dengan terjadinya kawin lari tersebut adalah berupa :

1. Hubungan anak perempuan dengan orang tua bisa lepas.
2. Hubungan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan saling bermusuhan.
3. Kemungkinan besar anak tersebut dibunuh apa bila anak tersebut ditemukan.⁴¹

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa perbuatan kawin lari mempunyai akibat terhadap siri' (malu) yang dipertahankan masyarakat suku Bugis Kecamatan Nipah Panjang, karena apabila terjadi kawin lari akan menimbulkan akibat sebagai berikut :

1. Karena malu pihak keluarga perempuan akan pindah dari tempat kediamannya.
2. Hubungan anak perempuan dengan orang tua dapat terputus.
3. Hubungan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan akan saling bermusuhan.
4. Pembunuhan akan terjadi terhadap salah satu atau kedua pihak yang melakukan kawin lari apa bila ditemukan oleh pihak keluarga perempuan.

⁴¹. Djufri Ismail, *Wawancara*, Kantor Camat Kecamatan Nipah Panjang, Tanggal 26 Juli 1996.

4.3.3. Cara Penyelesaian Adat

Di zaman yang sudah berubah ini dan semakin tertanamnya jiwa Pancasila serta kuatnya keyakinan akan ajaran agama, maka tidak selamanya kebencian dan dendam orang tua kepada anak maupun suami anaknya tetap bertahan, terlebih lagi anaknya telah memberikan cucu. Dengan demikian pihak keluarga perempuan khususnya, sedikit banyak telah terbuka hatinya untuk menerima mereka ditengah-tengah keluarganya dan menghilangkan saling permusuhan dengan pihak keluarga laki-laki. Namun demikian untuk memperbaiki hubungan kembali dan disahkannya perkawinan pihak yang melarikan diri tersebut, maka dilakukanlah dengan cara penyelesaian adat (**maddeceng**).

Cara penyelesaian adat untuk memperbaiki hubungan ini oleh H. Pattarae selaku Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kecamatan Nipah Panjang seabgai berikut :

Cara penyelesaian adat ini adalah sebelum pria datang kerumah wanita terlebih dahulu mengutus beberapa orang seperti sesepuh adat, alim ulama, kades maupun keluarga dekat si pria. Dalam acara ini pihak wanita meminta uang pengganti adat yang dipergunakan untuk kenduri ataupun do'a selamat. Bagi masyarakat Bugis yang fanatik perkawinan yang dilakukan sebelumnya tidak sah sehingga harus dinikahkan kembali dengan dihadiri oleh wali si wanita.⁴²

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa untuk terjalinnya hubungan baik kembali antara anak dengan orang tua dan antar orang tua yang melakukan kawin lari, pasangan yang melakukan kawin lari untuk sementara dipisahkan, yaitu perempuan kembali ke rumahnya dan laki-

⁴². H. Pattarae, *Wawancara*, Kantor Camat Kecamatan Nipah Panjang, Tanggal 26 Juli 2003.

laki kembali kerumahnya semula. Sebelum laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan, terlebih dahulu harus mengutus beberapa orang yang terdiri dari :

1. Sesepuh Adat.
2. Alim Ulama.
3. Kepala Desa.
4. Ayah atau keluarga dekat dari pihak laki-laki (calon suami).

Sesampainya utusah pihak laki-laki di rumah pihak perempuan, diadakanlah perundingan-perundingan yang menyangkut hubungan anak-anak mereka dengan hak yang paling besar diterima oleh pihak perempuan. Dalam hal ini keluarga pihak perempuan meminta semacam uang pengganti adat yang besarnya bervariasi tergantung pada kesepakatan bersama oleh pihak yang hadir tersebut. Pada lokasi penelitian desa Pemusiran uang pengganti jumlah berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan di Desa Teluk Kijing jumlah uang pengganti ini biasanya berada pada angka Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Uang pengganti adat yang diminta pihak perempuan ini adalah digunakan untuk mengadakan kenduri maupun do'a selamat.

Pada lokasi penelitian ditentukan cara pernikahan ganda pada pasangan yang sama. Artinya walaupun telah dilakukan pernikahan terhadap pasangan di tempat perbuatan kawin lari dilangsungkan, namun apabila disepakati dengan uang pengganti adat, maka harus dilangsungkan perkawinan kembali secara Islam dengan alasan bahwa pernikahan itu

belum sah, karena hanya dihadiri oleh wali hakim dan tidak disetujui oleh keluarga atau ayah si perempuan. Untuk itu pasangan tersebut harus dinikahkan atau ayah si perempuan. Untuk itu pasangan tersebut harus dinikahkan kembali dan dihadiri oleh wali perempuan itu sendiri.

Adanya penyelesaian adat ini terhadap perbuatan kawin lari di Desa Pemusiran dan Teluk Kijing Kecamatan Nipah Panjang dalam lima tahun terakhir dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14.
Penyelesaian Adat Akibat Kawin Lari
di Desa Pemusiran Tahun 1999 – 2003

No.	Nama Pasangan	Tahun	Jumlah Uang Pengganti
1.	Zaenab dengan Amir	1999	Rp. 2.000.000,-
2.	Bece dengan Nurung	2000	Rp. 1.500.000,-
3.	A. Wolang dengan Komariah	2000	Rp. 1.500.000,-
4.	Petta dengan Susi	2000	Rp. 2.000.000,-
5.	Nurdin dengan Yanti	2002	Rp. 1.000.000,-

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Pemusiran Kecamatan Nipah Panjang

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa lima pasangan kawin lari yang melakukan penyelesaian adat di Desa Pemusiran, pembayaran uang penggantian berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- dimana yang membayar Rp. 1.000.000,- hanya satu pasangan yakni pasangan Nurdin dengan Yanti, yang membayar Rp. 1.500.000,- sebanyak dua pasangan yaitu pasangan Bece dengan Nurung dan pasangan Ambo Wolang dengan Komariah. Kemudian yang membayar Rp. 2.000.000,- adalah pasangan Zaenab dengan Amir dan pasangan Petta dengan Susi.

Tabel 15.
Penyelesaian Adat Akibat Kawin Lari
di Desa Teluk Kijing Tahun 1999 – 2003

No.	Nama Pasangan	Tahun	Jumlah Uang Pengganti
1.	Suariah dengan Jamalul Siti Rogaiah dengan	1999	Rp. 1.500.000,-
2.	Syamsuddin	1999	Rp. 1.500.000,-
3.	Mariam dengan Ali	2000	Rp. 1.750.000,-
4.	Bungatang depan Andi Asse	2000	Rp. 2.000.000,-
5.	Andi Fatima dengan Usman	2001	Rp. 1.750.000,-
6.	Cening dengan Baba	2001	Rp. 4.000.000,-
7.	Bunga dengan Pawello	2001	Rp. 2.000.000,-
8.	Madina dengan Andu	2002	Rp. 2.000.000,-
9.	Ambo Tuo dengan Andi Fitria	2003	Rp. 2.500.000,-

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Teluk Kijing Kecamatan Nipah Panjang

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir ini yang melakukan penyelesaian adat akibat kawin lari di Desa Teluk Kijing sebanyak sembilan pasang. Sedangkan besarnya uang pengganti yang diberikan adalah berkisar antara Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 4.000.000,-. Pada tabel tersebut yang membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.500.000,- adalah pasangan Suhariah dengan Jamalul dan Siti Rogaiah dengan Syamsuddin, yang membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.750.000,- adalah pasangan Mariam dengan Ali dan pasangan Andi Fatima dengan Usman. Sementara yang membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.000.000,- adalah pasangan Bungatang dengan Andi Asse, pasangan Bunga dengan Pawello dan Madina dengan Andu, pasangan yang membayar Rp. 2.000.000,- adalah Ambo Tuo dengan Andi Fitria. Sedangkan pasangan yang membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.000.000,- adalah Cening dengan Baba. Pembayaran uang pengganti ini umumnya sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga pihak laki-laki yang melakukan perbuatan kawin lari tersebut.

Banyaknya perbuatan kawin lari seperti yang terlihat pada tabel 14 dan tabel 15 yaitu masing-masing Desa Teluk Kijing Kecamatan Nipah Panjang, mencerminkan bahwa sekalipun sudah banyak terjadi perubahan pada kultur tradisional khususnya Suku Bufis, namun masih ada saja yang merasa bahwa perubahan-perubahan tersebut belum sesuai dengan keinginan mereka, terutama kaum muda yang ingin dengan mudah dan bebas untuk melakukan perkawinan. Keinginan kaum muda ini sudah barang tentu bertentangan dengan budaya dan norma-norma serta kaidah-kaidah agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang umumnya oleh kaum tua selalu dipegang teguh.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran-penjabaran pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang adalah :
 - a. Keluarga pihak perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan anaknya, karena anaknya telah dijodohkan sebelumnya.
 - b. Terlalu tinggi uang lamaran yang diminta.
 - c. Laki-laki yang akan melaksanakan perkawinan tersebut tidak berkelakuan baik.
 - d. Derajat perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.
2. Perbuatan kawin lari menimbulkan titik singgung dengan budaya siri' (malu) yang diyakini secara utuh sampai sekarang ini pada masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang. Terjadinya kawin lari menimbulkan akibat :
 - a. Karena malu pihak keluarga perempuan akan pindah dari desa tempat kediamannya.
 - b. Hubungan antara anak perempuan dengan keluarganya dapat terputus.
 - c. Hubungan antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan dapat memburuk dan terjadi permusuhan.
 - d. Pembunuhan terhadap salah satu atau kedua orang dari yang melakukan kawin lari apabila ditemukan.

3. Cara penyelesaian adat yang ditempuh oleh masyarakat suku Bugis terhadap akibat dari kawin lari adalah mendatangkan utusan pihak laki-laki ketempat pihak perempuan untuk merundingkan hubungan dari pasangan yang melakukan kawin lari. Pihak perempuan menerima uang pengganti adat yang digunakan untuk membiayai kenduri atau do'a selamat dan ditanamkan sebahagian masyarakat suku Bugis mensyaratkan adanya pernikahan kembali pada mempelai yang melakukan kawin lari tersebut setelah diterimanya uang pengganti.

5.2. SARAN – SARAN

Dalam kesempatan ini penulis dapat memberikan saran yang kiranya dapat menjadi salah satu jalan tengah dari permasalahan kawin lari pada masyarakat suku Bugis di Kecamatan Nipah Panjang, yaitu sebagai berikut :

1. Hendaknya masyarakat suku Bugis tidak lagi membagi-bagi masyarakat kedalam kelas-kelas sosial, karena dihadapan Tuhan dan hukum manusia adalah sederajat.
2. Para sesepuh adat hendaknya mampu mencari jalan keluar mengenai besarnya uang lamaran, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya perbuatan kawin lari bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Anonim, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1997.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, 1983.
- K. Wanyjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*, Dasar-dasar dan Aplikasi Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984.
- Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Gunung Agung, 1983.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Wirjono Prodjokoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974.